



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.127, 2010

Kementerian Keuangan.
Penanggulangan Kemiskinan.

Perencanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/PMK.07/2010

TENTANG

**INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA
PERENCANAAN**

**PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
8. Dana Urusan Bersama, yang selanjutnya disingkat DUB, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis.
9. Dana Daerah untuk Urusan Bersama, yang selanjutnya disingkat DDUB, adalah dana yang bersumber dari APBD.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Kemampuan Fiskal Daerah, yang selanjutnya disingkat KFD, adalah kemampuan keuangan daerah dan dana transfer ke daerah, dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
12. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah adalah suatu indikator umum yang menggambarkan kaitan antara ruang fiskal (fiscal space) daerah terhadap persentase penduduk miskin di daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, yang selanjutnya disebut TKPK Nasional, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan besaran (persentase) penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2011.

BAB III
DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN
INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan meliputi data fiskal daerah dan data non fiskal daerah.
- (2) Data fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data kemampuan keuangan daerah, data transfer ke daerah, dan data belanja pegawai negeri sipil daerah.
- (3) Data kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Data dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus.
- (5) Data non-fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk miskin, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
- (6) Persentase jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direpresentasikan melalui Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

Pasal 4

- (1) Data kemampuan keuangan daerah dan data belanja pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Data dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh dari Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai anggaran transfer ke daerah.
- (3) Data non-fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Data fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang digunakan adalah data tahun 2009.
- (2) Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang digunakan adalah data tahun 2008.

- (3) Penggunaan periode data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada ketersediaan data.

Pasal 6

Perhitungan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah bagi daerah pemekaran tahun 2008 dan tahun 2009 mengikuti pendekatan perhitungan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dari daerah induk.

BAB IV

FORMULA PERHITUNGAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah terdiri dari Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPMD).
- (2) IRFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan KFD riil per kapita dibagi dengan rata-rata KFD riil per kapita secara Nasional.
- (3) KFD riil per kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan KFD dibagi dengan jumlah penduduk dan IKK.
- (4) IPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) terhadap rata-rata IKM secara Nasional.
- (5) Perhitungan IRFD dan IPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Daerah yang mempunyai IRFD dan IPMD adalah 1, sama dengan rata-rata IRFD dan IPMD nasional ($1 =$ rata-rata nasional);
 - b. Daerah yang mempunyai IRFD dan IPMD lebih dari 1, di atas rata-rata IRFD dan IPMD nasional ($> 1 =$ di atas rata-rata nasional); dan
 - c. Daerah yang mempunyai IRFD dan IPMD kurang dari 1, di bawah rata-rata IRFD dan IPMD nasional ($< 1 =$ di bawah rata-rata nasional).

BAB V

PENENTUAN KELOMPOK DAERAH BERDASARKAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Kaitan antara IRFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan IPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) digambarkan dalam bentuk peta kuadran.
- (2) Berdasarkan peta kuadran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh kelompok daerah sebagai berikut:

- a. Kelompok 1 adalah daerah dengan indeks ruang fiskal dan indeks persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (IRFD dan IPPMD > 1);
- b. Kelompok 2 adalah daerah dengan indeks ruang fiskal di bawah rata-rata nasional, namun indeks persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (IRFD < 1, IPPMD > 1);
- c. Kelompok 3 adalah daerah dengan indeks ruang fiskal dan indeks persentase penduduk miskin di bawah rata-rata nasional (IRFD < 1, IPPMD < 1); dan
- d. Kelompok 4 adalah daerah dengan indeks ruang fiskal di atas rata-rata nasional, namun indeks persentase penduduk miskin di bawah rata-rata nasional (IRFD > 1, IPPMD < 1).

Pasal 9

- (1) Hasil pengelompokkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Hasil pengelompokkan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan TKPK Nasional sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan daerah penyelenggara urusan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan dan alokasi DUB.

BAB VI

PENENTUAN TINGKATAN BESARAN PENYEDIAAN DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)

Pasal 10

- (1) DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan dengan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) DDUB yang harus disediakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 1 menyediakan DDUB *sangat tinggi*;
 - b. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 2 menyediakan DDUB *sedang*;
 - c. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 3 menyediakan DDUB *rendah*; dan
 - d. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 4 menyediakan DDUB *tinggi*.

- (3) Penentuan batas presentase terendah dan tertinggi DDUB yang harus disediakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan hasil keputusan rapat koordinasi instansi yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan nasional.
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan bahan perhitungan rincian penyediaan DDUB untuk masing-masing daerah berdasarkan batas presentase terendah dan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil perhitungan rincian penyediaan DDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada TKPK Nasional paling lambat bulan Maret sebelum penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- (6) Hasil perhitungan rincian penyediaan DDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh TKPK Nasional sebagai bahan penetapan besaran DDUB pada masing-masing daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I.
NOMOR 59/PMK.07/2010 TENTANG INDEKS
FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM
RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN
BERSAMA PUSAT DAN DAERAH

**DAFTAR DAERAH BERDASARKAN
INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH**

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMd)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam				
1	Kab. Aceh Barat	0,633	1,230	2	Sedang
2	Kab. Aceh Besar	0,340	0,625	3	Rendah
3	Kab. Aceh Selatan	0,391	0,859	3	Rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0,980	1,121	2	Sedang
5	Kab. Aceh Tengah	0,565	0,974	3	Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	0,786	1,211	2	Sedang
7	Kab. Aceh Timur	0,522	1,201	2	Sedang
8	Kab. Aceh Utara	0,171	1,223	2	Sedang
9	Kab. Bireuen	0,395	0,842	3	Rendah
10	Kab. Aceh Pidie	0,323	0,645	3	Rendah
11	Kab. Simeulue	1,292	1,607	1	Sangat Tinggi
12	Kota Banda Aceh	0,509	0,337	3	Rendah
13	Kota Sabang	1,167	0,386	4	Tinggi
14	Kota Langsa	0,699	0,499	3	Rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,733	0,471	3	Rendah
16	Kab. Gayo Lues	1,327	1,391	1	Sangat Tinggi
17	Kab. Aceh Barat Daya	1,450	1,049	1	Sangat Tinggi
18	Kab. Aceh Jaya	0,881	1,020	2	Sedang

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
19	Kab. Nagan Raya	1,847	1,189	1	Sangat Tinggi
20	Kab. Aceh Tamiang	0,569	1,001	2	Sedang
21	Kab. Bener Meriah	0,880	1,059	2	Sedang
22	Kab. Pidie Jaya	1,412	0,645	4	Tinggi
23	Kota Subulussalam	0,896	1,121	2	Sedang
II	Provinsi Sumatera Utara				
1	Kab. Asahan	0,264	0,738	3	Rendah
2	Kab. Dairi	0,447	1,090	2	Sedang
3	Kab. Deli Serdang	0,228	0,643	3	Rendah
4	Kab. Tanah Karo	0,295	0,666	3	Rendah
5	Kab. Labuhan Batu	0,151	1,156	2	Sedang
6	Kab. Langkat	0,249	0,763	3	Rendah
7	Kab. Mandailing Natal	0,433	1,453	2	Sedang
8	Kab. Nias	0,305	1,987	2	Sedang
9	Kab. Simalungun	0,250	0,795	3	Rendah
10	Kab. Tapanuli Selatan	0,543	1,263	2	Sedang
11	Kab. Tapanuli Tengah	0,412	1,196	2	Sedang
12	Kab. Tapanuli Utara	0,531	1,275	2	Sedang
13	Kab. Toba Samosir	0,708	0,843	3	Rendah
14	Kota Binjai	0,449	0,605	3	Rendah
15	Kota Medan	0,353	0,347	3	Rendah
16	Kota Pematang Siantar	0,531	0,326	3	Rendah
17	Kota Sibolga	1,223	0,564	4	Tinggi
18	Kota Tanjung Balai	0,733	0,522	3	Rendah
19	Kota Tebing Tinggi	0,863	0,413	3	Rendah
20	Kota Padang Sidempuan	0,484	0,916	3	Rendah
21	Kab. Pakpak Bharat	2,467	1,498	1	Sangat Tinggi
22	Kab. Nias Selatan	0,390	1,834	2	Sedang
23	Kab. Humbang Hasundutan	0,958	1,251	2	Sedang
24	Kab. Serdang Berdagai	0,311	0,723	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
25	Kab. Samosir	0,895	1,359	2	Sedang
26	Kab. Batu Bara	0,419	0,738	3	Rendah
27	Kab. Padang Lawas	0,291	1,263	2	Sedang
28	Kab. Padang Lawas Utara	0,521	1,263	2	Sedang
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	0,302	1,156	2	Sedang
30	Kab. Labuhan Batu Utara	0,226	1,156	2	Sedang
III	Provinsi Sumatera Barat				
1	Kab. Limapuluh Kota	0,304	0,815	3	Rendah
2	Kab. Agam	0,174	0,794	3	Rendah
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1,971	2,220	1	Sangat Tinggi
4	Kab. Padang Pariaman	0,245	0,838	3	Rendah
5	Kab. Pasaman	0,479	0,876	3	Rendah
6	Kab. Pesisir Selatan	0,322	0,814	3	Rendah
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	0,614	1,107	2	Sedang
8	Kab. Solok	0,286	0,854	3	Rendah
9	Kab. Tanah Datar	0,242	0,630	3	Rendah
10	Kota Bukit Tinggi	0,621	0,308	3	Rendah
11	Kota Padang Panjang	1,768	0,325	4	Tinggi
12	Kota Padang	0,216	0,348	3	Rendah
13	Kota Payakumbuh	0,922	0,478	3	Rendah
14	Kota Sawahlunto	1,850	0,380	4	Tinggi
15	Kota Solok	1,136	0,434	4	Tinggi
16	Kota Pariaman	1,535	0,504	4	Tinggi
17	Kab. Pasaman Barat	0,454	1,113	2	Sedang
18	Kab. Dharmasraya	1,035	0,872	4	Tinggi
19	Kab. Solok Selatan	0,825	1,075	2	Sedang
IV	Provinsi Riau				
1	Kab. Bengkalis	2,126	1,384	1	Sangat Tinggi
2	Kab. Indragiri Hilir	0,617	1,797	2	Sedang
3	Kab. Indragiri Hulu	1,236	1,073	1	Sangat Tinggi

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
4	Kab. Kampar	1,226	0,811	4	Tinggi
5	Kab. Kuantan Singingi	1,264	0,951	4	Tinggi
6	Kab. Pelalawan	1,561	1,265	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Rokan Hilir	1,597	1,553	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Rokan Hulu	0,996	1,065	2	Sedang
9	Kab. Siak	3,528	1,001	1	Sangat Tinggi
10	Kota Dumai	1,353	0,794	4	Tinggi
11	Kota Pekanbaru	0,791	0,356	3	Rendah
V	Provinsi Jambi				
1	Kab. Batanghari	0,840	1,028	2	Sedang
2	Kab. Bungo	0,608	1,002	2	Sedang
3	Kab. Kerinci	0,300	0,522	3	Rendah
4	Kab. Merangin	0,584	1,092	2	Sedang
5	Kab. Muaro Jambi	0,734	0,944	3	Rendah
6	Kab. Sarolangun	0,827	1,145	2	Sedang
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,188	1,583	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,214	1,780	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Tebo	0,742	1,104	2	Sedang
10	Kota Jambi	0,321	0,403	3	Rendah
11	Kota Sungai Penuh	0,582	0,521	3	Rendah
VI	Provinsi Sumatera Selatan				
1	Kab. Lahat	0,781	1,141	2	Sedang
2	Kab. Musi Banyuasin	1,746	1,269	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Musi Rawas	0,925	1,150	2	Sedang
4	Kab. Muara Enim	0,723	1,301	2	Sedang
5	Kab. Ogan Komering Ilir	0,477	1,436	2	Sedang
6	Kab. Ogan Komering Ulu	0,958	0,857	3	Rendah
7	Kota Palembang	0,323	0,353	3	Rendah
8	Kota Prabumulih	1,533	0,589	4	Tinggi
9	Kota Pagar Alam	0,872	0,494	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
10	Kota Lubuk Linggau	1,569	0,544	4	Tinggi
11	Kab. Banyuasin	0,398	1,498	2	Sedang
12	Kab. Ogan Ilir	0,497	1,338	2	Sedang
13	Kab. OKU Timur	0,499	0,951	3	Rendah
14	Kab. OKU Selatan	0,625	1,564	2	Sedang
15	Kab. Empat Lawang	1,009	1,141	1	Sangat Tinggi
VII	Provinsi Bengkulu				
1	Kab. Bengkulu Selatan	0,594	0,914	3	Rendah
2	Kab. Bengkulu Utara	0,286	1,396	2	Sedang
3	Kab. Rejang Lebong	0,559	1,287	2	Sedang
4	Kota Bengkulu	0,414	0,440	3	Rendah
5	Kab. Kaur	0,868	1,265	2	Sedang
6	Kab. Seluma	0,492	1,494	2	Sedang
7	Kab. Mukomuko	1,305	1,374	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Lebong	1,263	1,112	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Kepahiang	1,208	1,062	1	Sangat Tinggi
10	Kab. Bengkulu Tengah	0,187	1,396	2	Sedang
VIII	Provinsi Lampung				
1	Kab. Lampung Barat	0,343	1,068	2	Sedang
2	Kab. Lampung Selatan	0,290	0,690	3	Rendah
3	Kab. Lampung Tengah	0,162	0,984	3	Rendah
4	Kab. Lampung Utara	0,241	1,523	2	Sedang
5	Kab. Lampung Timur	0,179	0,956	3	Rendah
6	Kab. Tanggamus	0,245	0,946	3	Rendah
7	Kab. Tulang Bawang	0,294	0,962	3	Rendah
8	Kab. Way Kanan	0,747	1,255	2	Sedang
9	Kota Bandar Lampung	0,259	0,350	3	Rendah
10	Kota Metro	0,990	0,570	3	Rendah
11	Kab. Pesawaran	0,174	0,690	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
IX	Provinsi DKI Jakarta				
X	Provinsi Jawa Barat				
1	Kab. Bandung	0,169	0,454	3	Rendah
2	Kab. Bekasi	0,292	0,488	3	Rendah
3	Kab. Bogor	0,201	0,658	3	Rendah
4	Kab. Ciamis	0,167	0,670	3	Rendah
5	Kab. Cianjur	0,167	0,923	3	Rendah
6	Kab. Cirebon	0,186	0,686	3	Rendah
7	Kab. Garut	0,126	0,829	3	Rendah
8	Kab. Indramayu	0,215	0,797	3	Rendah
9	Kab. Karawang	0,244	0,558	3	Rendah
10	Kab. Kuningan	0,165	0,593	3	Rendah
11	Kab. Majalengka	0,209	0,649	3	Rendah
12	Kab. Purwakarta	0,262	0,892	3	Rendah
13	Kab. Subang	0,218	0,513	3	Rendah
14	Kab. Sukabumi	0,135	0,968	3	Rendah
15	Kab. Sumedang	0,216	0,607	3	Rendah
16	Kab. Tasikmalaya	0,124	0,947	3	Rendah
17	Kota Bandung	0,427	0,347	3	Rendah
18	Kota Bekasi	0,280	0,346	3	Rendah
19	Kota Bogor	0,268	0,387	3	Rendah
20	Kota Cirebon	0,640	0,428	3	Rendah
21	Kota Depok	0,259	0,249	3	Rendah
22	Kota Sukabumi	0,628	0,373	3	Rendah
23	Kota Tasikmalaya	0,285	0,434	3	Rendah
24	Kota Cimahi	0,294	0,362	3	Rendah
25	Kota Banjar	0,765	0,574	3	Rendah
26	Kab. Bandung Barat	0,208	0,454	3	Rendah
XI	Provinsi Jawa Tengah				
1	Kab. Banjarnegara	0,167	0,691	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
2	Kab. Banyumas	0,188	0,495	3	Rendah
3	Kab. Batang	0,213	0,686	3	Rendah
4	Kab. Blora	0,185	0,831	3	Rendah
5	Kab. Boyolali	0,157	0,864	3	Rendah
6	Kab. Brebes	0,139	0,864	3	Rendah
7	Kab. Cilacap	0,180	0,686	3	Rendah
8	Kab. Demak	0,178	0,599	3	Rendah
9	Kab. Grobogan	0,166	0,842	3	Rendah
10	Kab. Jepara	0,220	0,563	3	Rendah
11	Kab. Karanganyar	0,184	0,731	3	Rendah
12	Kab. Kebumen	0,146	0,659	3	Rendah
13	Kab. Kendal	0,188	0,595	3	Rendah
14	Kab. Klaten	0,129	0,571	3	Rendah
15	Kab. Kudus	0,329	0,494	3	Rendah
16	Kab. Magelang	0,126	0,610	3	Rendah
17	Kab. Pati	0,157	0,670	3	Rendah
18	Kab. Pekalongan	0,178	0,659	3	Rendah
19	Kab. Pemasang	0,180	0,796	3	Rendah
20	Kab. Purbalingga	0,268	0,601	3	Rendah
21	Kab. Purworejo	0,160	0,588	3	Rendah
22	Kab. Rembang	0,244	0,578	3	Rendah
23	Kab. Semarang	0,237	0,507	3	Rendah
24	Kab. Sragen	0,191	0,918	3	Rendah
25	Kab. Sukoharjo	0,178	0,524	3	Rendah
26	Kab. Tegal	0,168	0,639	3	Rendah
27	Kab. Temanggung	0,222	0,454	3	Rendah
28	Kab. Wonogiri	0,131	0,855	3	Rendah
29	Kab. Wonosobo	0,199	0,676	3	Rendah
30	Kota Magelang	0,824	0,320	3	Rendah
31	Kota Pekalongan	0,456	0,380	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
32	Kota Salatiga	0,579	0,323	3	Rendah
33	Kota Semarang	0,371	0,319	3	Rendah
34	Kota Surakarta	0,572	0,299	3	Rendah
35	Kota Tegal	0,566	0,454	3	Rendah
XII	Provinsi DI Yogyakarta				
1	Kab. Bantul	0,227	0,535	3	Rendah
2	Kab. Gunung Kidul	0,207	0,962	3	Rendah
3	Kab. Kulon Progo	0,259	0,606	3	Rendah
4	Kab. Sleman	0,311	0,398	3	Rendah
5	Kota Yogyakarta	0,508	0,253	3	Rendah
XIII	Provinsi Jawa Timur				
1	Kab. Bangkalan	0,224	1,156	2	Sedang
2	Kab. Banyuwangi	0,182	0,779	3	Rendah
3	Kab. Blitar	0,221	0,495	3	Rendah
4	Kab. Bojonegoro	0,307	0,812	3	Rendah
5	Kab. Bondowoso	0,222	1,277	2	Sedang
6	Kab. Gresik	0,325	0,523	3	Rendah
7	Kab. Jember	0,198	1,043	2	Sedang
8	Kab. Jombang	0,209	0,467	3	Rendah
9	Kab. Kediri	0,174	0,458	3	Rendah
10	Kab. Lamongan	0,200	0,737	3	Rendah
11	Kab. Lumajang	0,168	0,856	3	Rendah
12	Kab. Madiun	0,307	0,657	3	Rendah
13	Kab. Magetan	0,216	0,502	3	Rendah
14	Kab. Malang	0,129	0,608	3	Rendah
15	Kab. Mojokerto	0,158	0,422	3	Rendah
16	Kab. Nganjuk	0,234	0,587	3	Rendah
17	Kab. Ngawi	0,209	0,745	3	Rendah
18	Kab. Pacitan	0,211	0,715	3	Rendah
19	Kab. Pamekasan	0,167	1,073	2	Sedang

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
20	Kab. Pasuruan	0,198	0,839	3	Rendah
21	Kab. Ponorogo	0,202	0,722	3	Rendah
22	Kab. Probolinggo	0,224	1,245	2	Sedang
23	Kab. Sampang	0,155	1,860	2	Sedang
24	Kab. Sidoarjo	0,326	0,361	3	Rendah
25	Kab. Situbondo	0,245	1,219	2	Sedang
26	Kab. Sumenep	0,157	1,298	2	Sedang
27	Kab. Trenggalek	0,270	0,596	3	Rendah
28	Kab. Tuban	0,208	0,811	3	Rendah
29	Kab. Tulungagung	0,171	0,404	3	Rendah
30	Kota Blitar	0,993	0,299	3	Rendah
31	Kota Kediri	0,933	0,322	3	Rendah
32	Kota Madiun	0,540	0,293	3	Rendah
33	Kota Malang	0,331	0,347	3	Rendah
34	Kota Mojokerto	1,352	0,287	4	Tinggi
35	Kota Pasuruan	0,713	0,513	3	Rendah
36	Kota Probolinggo	0,692	0,466	3	Rendah
37	Kota Surabaya	0,599	0,321	3	Rendah
38	Kota Batu	0,706	0,377	3	Rendah
XIV	Provinsi Kalimantan Barat				
1	Kab. Bengkayang	0,518	1,726	2	Sedang
2	Kab. Landak	0,678	1,928	2	Sedang
3	Kab. Kapuas Hulu	1,077	1,903	1	Sangat Tinggi
4	Kab. Ketapang	0,886	1,563	2	Sedang
5	Kab. Pontianak	0,132	1,663	2	Sedang
6	Kab. Sambas	0,347	1,846	2	Sedang
7	Kab. Sanggau	0,446	1,593	2	Sedang
8	Kab. Sintang	0,575	1,940	2	Sedang
9	Kota Pontianak	0,398	1,346	2	Sedang
10	Kota Singkawang	0,647	0,969	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
11	Kab. Sekadau	0,866	1,754	2	Sedang
12	Kab. Melawi	0,889	2,013	2	Sedang
13	Kab. Kayong Utara	1,364	1,563	1	Sangat Tinggi
14	Kab. Kubu Raya	0,258	1,663	2	Sedang
XV	Provinsi Kalimantan Tengah				
1	Kab. Barito Selatan	1,289	1,343	1	Sangat Tinggi
2	Kab. Barito Utara	1,318	1,190	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Kapuas	0,537	1,781	2	Sedang
4	Kab. Kotawaringin Barat	0,942	0,727	3	Rendah
5	Kab. Kotawaringin Timur	0,814	1,391	2	Sedang
6	Kota Palangkaraya	0,747	0,534	3	Rendah
7	Kab. Katingan	1,256	1,472	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Seruyan	2,250	1,786	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Sukamara	4,168	0,972	4	Tinggi
10	Kab. Lamandau	2,882	1,392	1	Sangat Tinggi
11	Kab. Gunung Mas	1,784	1,876	1	Sangat Tinggi
12	Kab. Pulang Pisau	1,256	1,722	1	Sangat Tinggi
13	Kab. Murung Raya	2,745	1,993	1	Sangat Tinggi
14	Kab. Barito Timur	1,665	1,195	1	Sangat Tinggi
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan				
1	Kab. Banjar	0,487	1,480	2	Sedang
2	Kab. Barito Kuala	0,714	1,586	2	Sedang
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,660	0,986	3	Rendah
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,446	1,015	2	Sedang
5	Kab. Hulu Sungai Utara	0,545	1,087	2	Sedang
6	Kab. Kota Baru	1,230	1,457	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Tabalong	1,174	1,147	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Tanah Laut	0,588	1,163	2	Sedang
9	Kab. Tapin	1,240	1,103	1	Sangat Tinggi
10	Kota Banjar Baru	0,883	0,598	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
11	Kota Banjarmasin	0,388	0,574	3	Rendah
12	Kab. Balangan	1,841	1,440	1	Sangat Tinggi
13	Kab. Tanah Bumbu	1,730	1,363	1	Sangat Tinggi
XVII	Provinsi Kalimantan Timur				
1	Kab. Berau	2,999	0,886	4	Tinggi
2	Kab. Bulungan	4,067	1,450	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Kutai Kartanegara	4,464	0,993	4	Tinggi
4	Kab. Kutai Barat	3,796	1,335	1	Sangat Tinggi
5	Kab. Kutai Timur	4,426	1,134	1	Sangat Tinggi
6	Kab. Malinau	8,971	1,550	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Nunukan	3,248	1,800	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Pasir	2,175	1,416	1	Sangat Tinggi
9	Kota Balikpapan	1,195	0,300	4	Tinggi
10	Kota Bontang	3,185	0,303	4	Tinggi
11	Kota Samarinda	1,062	0,421	4	Tinggi
12	Kota Tarakan	1,829	0,721	4	Tinggi
13	Kab. Penajam Paser Utara	2,935	0,698	4	Tinggi
14	Kab. Tana Tidung	30,928	1,450	1	Sangat Tinggi
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara				
1	Kab. Bolaang Mongondow	0,452	0,909	3	Rendah
2	Kab. Minahasa	0,314	0,409	3	Rendah
3	Kab. Sangihe	0,468	0,765	3	Rendah
4	Kota Bitung	0,576	0,477	3	Rendah
5	Kota Manado	0,358	0,360	3	Rendah
6	Kab. Kepulauan Talaud	1,301	0,718	4	Tinggi
7	Kab. Minahasa Selatan	0,746	0,663	3	Rendah
8	Kota Tomohon	1,161	0,258	4	Tinggi
9	Kab. Minahasa Utara	0,436	0,720	3	Rendah
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,028	0,765	4	Tinggi

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
11	Kota Kotamobagu	0,849	0,409	3	Rendah
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,594	0,909	4	Tinggi
13	Kab. Minahasa Tenggara	1,325	0,663	4	Tinggi
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,254	0,909	3	Rendah
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,492	0,909	3	Rendah
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah				
1	Kab. Banggai	0,599	0,698	3	Rendah
2	Kab. Banggai Kepulauan	0,696	0,955	3	Rendah
3	Kab. Buol	1,544	0,962	4	Tinggi
4	Kab. Toli-Toli	0,705	0,868	3	Rendah
5	Kab. Donggala	0,230	1,166	2	Sedang
6	Kab. Morowali	1,104	1,207	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Poso	0,816	0,876	3	Rendah
8	Kota Palu	0,360	0,463	3	Rendah
9	Kab. Parigi Moutong	0,494	0,919	3	Rendah
10	Kab. Tojo Una Una	0,983	1,042	2	Sedang
11	Kab. Sigi	0,403	1,166	2	Sedang
XX	Provinsi Sulawesi Selatan				
1	Kab. Bantaeng	0,780	1,117	2	Sedang
2	Kab. Barru	1,226	0,675	4	Tinggi
3	Kab. Bone	0,364	0,994	3	Rendah
4	Kab. Bulukumba	0,326	0,919	3	Rendah
5	Kab. Enrekang	1,008	1,024	1	Sangat Tinggi
6	Kab. Gowa	0,235	1,064	2	Sedang
7	Kab. Jeneponto	0,417	1,154	2	Sedang
8	Kab. Luwu	0,393	0,939	3	Rendah
9	Kab. Luwu Utara	0,472	0,913	3	Rendah
10	Kab. Maros	0,707	1,036	2	Sedang

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	0,626	0,852	3	Rendah
12	Kota Palopo	0,923	0,448	3	Rendah
13	Kab. Luwu Timur	0,984	0,709	3	Rendah
14	Kab. Pinrang	0,449	0,680	3	Rendah
15	Kab. Sinjai	0,446	0,837	3	Rendah
16	Kab. Selayar	1,363	0,665	4	Tinggi
17	Kab. Sidenreng Rappang	0,750	0,580	3	Rendah
18	Kab. Soppeng	0,458	0,805	3	Rendah
19	Kab. Takalar	0,494	1,017	2	Sedang
20	Kab. Tana Toraja	0,254	1,568	2	Sedang
21	Kab. Wajo	0,327	0,938	3	Rendah
22	Kota Pare-pare	0,967	0,309	3	Rendah
23	Kota Makassar	0,303	0,320	3	Rendah
24	Kab. Toraja Utara	0,109	1,568	2	Sedang
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara				
1	Kab. Buton	0,271	0,971	3	Rendah
2	Kab. Konawe	0,332	0,925	3	Rendah
3	Kab. Kolaka	0,766	0,850	3	Rendah
4	Kab. Muna	0,523	0,938	3	Rendah
5	Kota Kendari	0,250	0,463	3	Rendah
6	Kota Bau-bau	0,845	0,464	3	Rendah
7	Kab. Konawe Selatan	0,497	1,424	2	Sedang
8	Kab. Bombana	1,615	1,105	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Wakatobi	1,205	0,907	4	Tinggi
10	Kab. Kolaka Utara	1,388	0,897	4	Tinggi
11	Kab. Konawe Utara	3,064	0,925	4	Tinggi
12	Kab. Buton Utara	2,434	0,938	4	Tinggi
XXII	Provinsi Bali				
1	Kab. Badung	1,101	0,394	4	Tinggi
2	Kab. Bangli	0,412	0,949	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
3	Kab. Buleleng	0,247	0,672	3	Rendah
4	Kab. Gianyar	0,389	0,741	3	Rendah
5	Kab. Jembrana	0,490	0,606	3	Rendah
6	Kab. Karangasem	0,430	1,323	2	Sedang
7	Kab. Klungkung	0,504	0,876	3	Rendah
8	Kab. Tabanan	0,352	0,480	3	Rendah
9	Kota Denpasar	0,489	0,252	3	Rendah
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
1	Kab. Bima	0,498	0,986	3	Rendah
2	Kab. Dompu	0,397	1,024	2	Sedang
3	Kab. Lombok Barat	0,135	1,266	2	Sedang
4	Kab. Lombok Tengah	0,227	1,370	2	Sedang
5	Kab. Lombok Timur	0,186	1,204	2	Sedang
6	Kab. Sumbawa	0,311	0,907	3	Rendah
7	Kota Mataram	0,304	0,593	3	Rendah
8	Kota Bima	0,679	0,731	3	Rendah
9	Kab. Sumbawa Barat	1,840	0,841	4	Tinggi
10	Kab. Lombok Utara	0,376	1,266	2	Sedang
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
1	Kab. Alor	0,497	1,286	2	Sedang
2	Kab. Belu	0,255	1,342	2	Sedang
3	Kab. Ende	0,312	0,957	3	Rendah
4	Kab. Flores Timur	0,441	0,845	3	Rendah
5	Kab. Kupang	0,271	1,460	2	Sedang
6	Kab. Lembata	0,844	1,009	2	Sedang
7	Kab. Manggarai	0,292	1,124	2	Sedang
8	Kab. Ngada	0,717	0,744	3	Rendah
9	Kab. Sikka	0,329	1,207	2	Sedang
10	Kab. Sumba Barat	0,961	1,550	2	Sedang

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
11	Kab. Sumba Timur	0,557	1,480	2	Sedang
12	Kab. Timor Tengah Selatan	0,243	1,857	2	Sedang
13	Kab. Timor Tengah Utara	0,502	1,226	2	Sedang
14	Kota Kupang	0,396	0,381	3	Rendah
15	Kab. Rote Ndao	0,879	1,109	2	Sedang
16	Kab. Manggarai Barat	0,605	1,519	2	Sedang
17	Kab. Nagekeo	0,683	0,744	3	Rendah
18	Kab. Sumba Tengah	1,503	1,550	1	Sangat Tinggi
19	Kab. Sumba Barat Daya	0,420	1,550	2	Sedang
20	Kab. Manggarai Timur	0,297	1,124	2	Sedang
XXV	Provinsi Maluku				
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,880	1,033	2	Sedang
2	Kab. Maluku Tengah	0,364	0,832	3	Rendah
3	Kab. Maluku Tenggara	0,943	0,927	3	Rendah
4	Kab. Pulau Buru	0,626	1,718	2	Sedang
5	Kota Ambon	0,349	0,424	3	Rendah
6	Kab. Seram Bagian Barat	0,947	0,892	3	Rendah
7	Kab. Seram Bagian Timur	1,921	1,153	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Kepulauan Aru	1,907	1,782	1	Sangat Tinggi
9	Kota Tual	0,485	0,927	3	Rendah
10	Kab. Maluku Barat Daya	0,847	1,033	2	Sedang
11	Kab. Buru Selatan	1,313	1,718	1	Sangat Tinggi
XXVI	Provinsi Papua				
1	Kab. Biak Numfor	0,987	1,157	2	Sedang
2	Kab. Jayapura	1,414	1,139	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Jayawijaya	0,377	2,615	2	Sedang
4	Kab. Merauke	1,252	1,320	1	Sangat Tinggi
5	Kab. Mimika	2,316	1,479	1	Sangat Tinggi
6	Kab. Nabire	1,036	1,923	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Paniai	0,859	2,393	2	Sedang

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
8	Kab. Puncak Jaya	0,555	2,393	2	Sedang
9	Kab. Yapen Waropen	1,311	0,952	4	Tinggi
10	Kota Jayapura	0,696	0,546	3	Rendah
11	Kab. Sarmi	8,683	2,275	1	Sangat Tinggi
12	Kab. Keerom	3,307	1,429	1	Sangat Tinggi
13	Kab. Yahukimo	0,690	3,406	2	Sedang
14	Kab. Pegunungan Bintang	1,108	2,615	1	Sangat Tinggi
15	Kab. Tolikara	1,921	3,510	1	Sangat Tinggi
16	Kab. Boven Digoel	6,895	2,223	1	Sangat Tinggi
17	Kab. Mappi	2,635	2,401	1	Sangat Tinggi
18	Kab. Asmat	2,365	2,762	1	Sangat Tinggi
19	Kab. Waropen	11,103	2,083	1	Sangat Tinggi
20	Kab. Supiori	11,010	1,754	1	Sangat Tinggi
21	Kab. Memberamo Raya	10,254	2,616	1	Sangat Tinggi
22	Kab. Memberamo Tengah	0,477	2,616	2	Sedang
23	Kab. Yalimo	0,163	2,616	2	Sedang
24	Kab. Lanny Jaya	0,300	2,616	2	Sedang
25	Kab. Nduga	0,398	2,616	2	Sedang
26	Kab. Dogiyai	0,928	1,923	2	Sedang
27	Kab. Puncak	0,715	2,393	2	Sedang
XXVII	Provinsi Maluku Utara				
1	Kab. Halmahera Tengah	3,398	0,682	4	Tinggi
2	Kota Ternate	0,838	0,545	3	Rendah
3	Kab. Halmahera Barat	0,911	1,313	2	Sedang
4	Kab. Halmahera Timur	3,017	1,356	1	Sangat Tinggi
5	Kab. Halmahera Selatan	0,938	1,972	2	Sedang
6	Kab. Halmahera Utara	0,776	1,245	2	Sedang
7	Kab. Kepulauan Sula	1,424	1,134	1	Sangat Tinggi
8	Kota Tidore Kepulauan	0,955	0,942	3	Rendah

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
XXVIII	Provinsi Banten				
1	Kab. Lebak	0,233	1,093	2	Sedang
2	Kab. Pandeglang	0,224	1,036	2	Sedang
3	Kab. Serang	0,126	0,945	3	Rendah
4	Kab. Tangerang	0,255	0,544	3	Rendah
5	Kota Cilegon	0,786	0,453	3	Rendah
6	Kota Tangerang	0,379	0,404	3	Rendah
7	Kota Serang	0,118	0,945	3	Rendah
XXIX	Provinsi Bangka Belitung				
1	Kab. Bangka	0,542	0,763	3	Rendah
2	Kab. Belitung	1,072	0,690	4	Tinggi
3	Kota Pangkal Pinang	0,923	0,317	3	Rendah
4	Kab. Bangka Selatan	1,334	0,948	4	Tinggi
5	Kab. Bangka Tengah	0,846	0,757	3	Rendah
6	Kab. Bangka Barat	0,842	1,377	2	Sedang
7	Kab. Belitung Timur	1,252	0,717	4	Tinggi
XXX	Provinsi Gorontalo				
1	Kab. Boalemo	0,805	0,753	3	Rendah
2	Kab. Gorontalo	0,458	0,751	3	Rendah
3	Kota Gorontalo	0,559	0,522	3	Rendah
4	Kab. Pohuwato	1,027	0,853	4	Tinggi
5	Kab. Bone Bolango	0,697	0,702	3	Rendah
6	Kab. Gorontalo Utara	1,362	0,751	4	Tinggi
XXXI	Provinsi Riau Kepulauan				
1	Kab. Natuna	3,789	0,981	4	Tinggi
2	Kab. Kepulauan Anambas	3,795	0,981	4	Tinggi
3	Kab. Karimun	1,026	0,752	4	Tinggi
4	Kota Batam	0,502	0,361	3	Rendah
5	Kota Tanjung Pinang	0,898	0,364	3	Rendah
6	Kab. Lingga	2,186	0,984	4	Tinggi

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
7	Kab. Bintan	1,818	0,751	4	Tinggi
XXXII	Provinsi Papua Barat				
1	Kab. Fak Fak	3,629	1,127	1	Sangat Tinggi
2	Kab. Manokwari	1,688	1,704	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Sorong	1,788	2,093	1	Sangat Tinggi
4	Kota Sorong	0,584	0,573	3	Rendah
5	Kab. Raja Ampat	3,469	1,188	1	Sangat Tinggi
6	Kab. Sorong Selatan	3,383	1,915	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Teluk Bintuni	5,683	1,741	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Teluk Wondama	7,642	1,682	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Kaimana	5,234	1,593	1	Sangat Tinggi
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat				
1	Kab. Majene	0,634	0,726	3	Rendah
2	Kab. Mamuju	0,555	1,062	2	Sedang
3	Kab. Polewali Mandar	0,280	0,999	3	Rendah
4	Kab. Mamasa	0,943	1,995	2	Sedang
5	Kab. Mamuju Utara	1,078	1,163	1	Sangat Tinggi
DAERAH PEMEKARAN					
1	Kab. Nias Utara	0,305	1,987	2	Sedang
2	Kab. Nias Barat	0,305	1,987	2	Sedang
3	Kota Gunung Sitoli	0,305	1,987	2	Sedang
4	Kab. Pringsewu	0,245	0,946	3	Rendah
5	Kab. Mesuji	0,294	0,962	3	Rendah
6	Kab. Tulang Bawang Barat	0,294	0,962	3	Rendah
7	Kota Tangerang Selatan	0,294	0,962	3	Rendah
8	Kab. Sabu Raijua	0,396	0,381	3	Rendah
9	Kab. Pulau Morotai	0,776	1,245	2	Sedang
10	Kab. Intan Jaya	0,859	2,393	2	Sedang

No.	Kab / Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkatan Penyediaan DUUB
11	Kab. Deiyai	0,859	2,393	2	Sedang
12	Kab. Tambrau	0,584	0,573	3	Rendah
13	Kab. Kepulauan Meranti	2,126	1,384	1	Sangat Tinggi
14	Kab. Maybrat	0,584	0,573	3	Rendah

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI INDRAWATI